

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada antara kelompok-kelompok dari masyarakat merupakan salah satu tujuan dari setiap negara. Salah satu faktor yang paling krusial dalam dinamika setiap warga negara yang beragam adalah dengan adanya demokrasi yang terbuka untuk seluruh rakyat. Inilah yang menjadi kunci utama dalam menyikapi situasi heterogen ini. Oleh karena itu, setiap kelompok kepentingan masyarakat dalam sebuah negara didorong untuk mengutarakan dan memperjuangkan hak-haknya. Adanya benturan kepentingan mungkin bisa saja terjadi ketika berbagai kelompok tersebut saling bertabrakan dengan kepentingan lainnya. Dengan adanya banyak perbedaan dalam setiap masyarakat di berbagai negara, salah satunya adalah negara yang ada di wilayah timur tengah rawan akan munculnya konflik (Rasyid, 2023).

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik internasional yang telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun serta melibatkan banyak negara arab maupun negara-negara barat (Ginting, 2013). Konflik yang telah terjadi cukup lama ini menjadi konflik yang paling banyak di perbincangkan serta mendapat banyak sorotan dari seluruh dunia. Israel dan Palestina bagaikan air dan minyak yang tidak bisa disatukan dalam suatu wilayah karena akan selalu adanya pergolakan yang terjadi antara dua negara tersebut. Perselisihan yang terjadi antara kedua negara ini didasari oleh beragam spekulasi maupun tanggapan dari berbagai pihak. Tidak sedikit yang mengaitkannya dengan berbagai isu, seperti isu agama, politik, ekonomi, bahkan ideologi. Namun apa pun dugaannya, konflik Israel-Palestina telah mengakibatkan banyak korban berjatuh. Masyarakat sipil merupakan pihak yang paling dirugikan dalam konflik kedua negara tersebut.

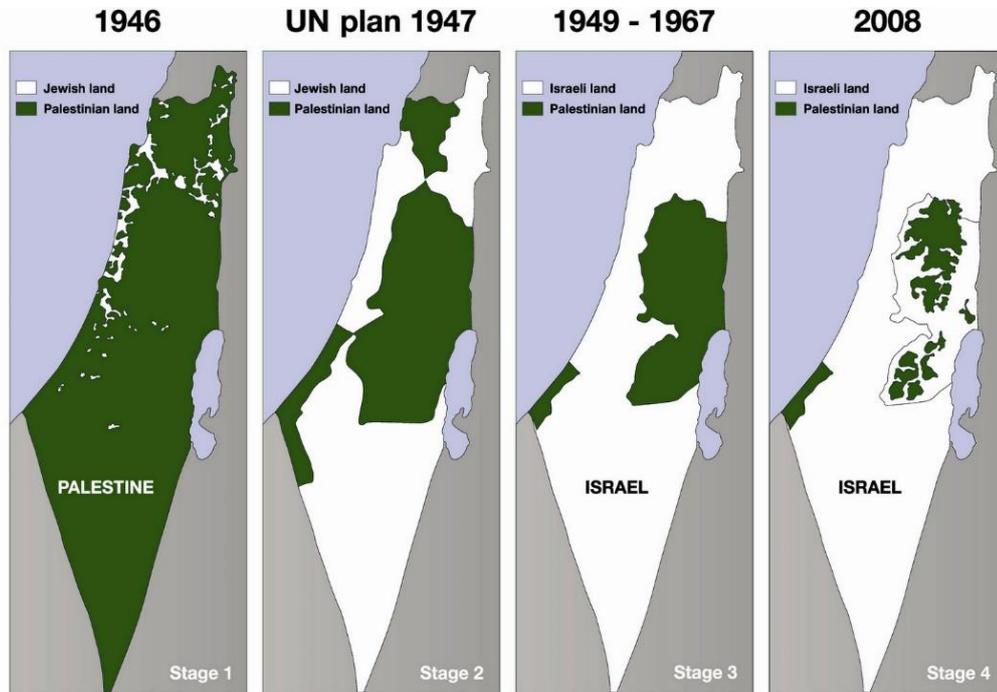
Peperangan yang tengah berlangsung sampai saat ini telah memakan banyak korban serta banyak menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan baik secara fisik maupun mental terhadap rakyat Palestina. Situasi tersebut telah memicu adanya konflik lain di wilayah Timur Tengah. Intervensi yang ditengarai oleh Israel

tersebut menyebabkan konflik yang semakin merata melibatkan berbagai negara di sekitarnya, seperti Suriah, Irak, Mesir, Yordania, Iran, Arab Saudi dan negara di kawasan Timur Tengah lainnya.

Konflik Israel-Palestina pada saat ini bukanlah sebuah konflik yang mudah untuk diselesaikan. Seluruh bangsa Israel memiliki satu pandangan yang sama terhadap bangsa Palestina, begitu pun sebaliknya bahwa bangsa Palestina juga memiliki satu pandangan yang sama terhadap bangsa Israel. Pandangan dari kedua belah pihak sangat bertolak belakang karena pada dasarnya konflik mereka sudah dari lama terjadi yang memiliki perbedaan kepentingan serta keyakinan yang mereka yakini (Anwar, 2019). Konflik tersebut mulai memanas kembali sejak adanya keputusan dari PBB yang mengakhiri pengawasan Inggris di wilayah Palestina dan membagi wilayah Palestina menjadi dua negara, yaitu wilayah yang ditujukan untuk masyarakat Yahudi Israel serta Arab Palestina. Langkah yang ditetapkan oleh PBB tersebut memicu timbulnya protes dari rakyat Palestina yang nota benenya sudah sejak lama menempati wilayah tersebut. Namun, sikap Israel yang bersikeras ingin menguasai seluruh wilayah Palestina berubah menjadi konflik yang berkepanjangan dengan dampak yang sangat luas.

Israel yang tetap bersikeras terus membangun pemukiman pada daerah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang mengganggu adanya proses perdamaian. Adanya upaya proses negosiasi hingga resolusi yang dilakukan oleh organisasi internasional serta berbagai negara internasional, namun banyak menemukan jalan buntu walaupun sebenarnya hal tersebut termasuk dalam agenda utama dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan, beberapa upaya perdamaian pun telah dilakukan dalam menyelesaikan konflik ini, antaranya adalah melalui berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan Gerakan Non-Blok (GNB). Permasalahan ini pada dasarnya telah menjadi isu utama yang dibahas dalam agenda mereka dan terus berupaya untuk memfasilitasi serta memberikan solusi negosiasi dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Akan tetapi, upaya yang dilakukan tersebut tetap saja tidak menemukan jalan keluarnya akibat adanya pembangunan serta pendudukan pemukiman yang dilakukan oleh Israel.

Gambar 1. 1 Peta Perkembangan Penyebaran Penduduk Israel di Wilayah Palestina dari Masa ke Masa



Sumber: Al Jazeera

Pada gambar diatas menunjukkan bahwasanya dalam rentang waktu kurang lebih 66 tahun pembangunan serta pendudukan yang dilakukan Israel atas wilayah Palestina mengakibatkan berkurangnya wilayah dari Palestina secara signifikan. Selain itu, Israel juga kerap membatasi akses terhadap adanya bantuan yang datang, seperti makanan dan obat-obatan yang tujuannya untuk masyarakat Palestina. Akibat dari adanya pembatasan akses tersebut berakibat langsung terhadap banyaknya korban yang berjatuhan. Dalam hal ini, sejak PBB menangani konflik Israel dan Palestina serta menetapkan yang namanya resolusi 181 atau biasa disebut *UN partition plan* yang membagi wilayah Palestina menjadi dua, yaitu untuk Yahudi dan Arab (Bakar, 2008). Palestina pada hari ini senantiasa menjadi perhatian warga dunia dengan tidak bersahabatnya situasi yang terjadi di Palestina akibat adanya pembangunan, pendudukan hingga serangan dari Israel.

Dalam konteks ini, isu kedaulatan negara muncul dalam konflik Israel-Palestina. Pada dasarnya kedaulatan negara itu merupakan salah satu hal yang

cukup penting untuk dijaga dalam sebuah negara. Negara berdaulat bisa dikatakan sebagai negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang artinya bebas dari kekangan maupun pengaruh dari negara lain. Suatu negara dapat dikatakan ada dan hidup tetapi itu belum bisa menjamin bahwa negara tersebut memiliki kedaulatan, dengan adanya kedaulatan negara dapat secara bebas melakukan berbagai kepentingannya dengan catatan kepentingan tersebut tidak berlawanan dengan hukum Internasional (Sigit, 2012). Negara Palestina merupakan negara yang sampai pada hari ini masih berusaha untuk mendapatkan kedaulatan dalam wilayah dunia internasional. Adanya konflik politik yang terjadi menjadikan negara Palestina sampai saat ini belum bisa mewujudkan sebuah negara yang berdaulat. Israel sendiri mengklaim kedaulatan atas wilayah Palestina yang telah memicu konflik, termasuk wilayah yang dianggap mereka sebagai bagian dari negara Palestina. Indonesia yang nota benanya adalah negara yang netral dalam dunia internasional, turut mengecam tindakan Israel yang mengklaim kedaulatan pada wilayah Palestina.

Indonesia pada dasarnya melakukan hubungan politik luar negeri serta diplomasi memiliki tujuan untuk memastikan terjaminnya kepentingan nasional, kesejahteraan rakyat, serta pertumbuhan ekonomi (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014). Searah dengan dinamika hubungan politik internasional pada cakupan nasional maupun internasional, kebijakan politik luar negeri serta diplomasi Indonesia tetap terpaku pada pelaksanaan politik bebas aktif. Politik bebas aktif merupakan politik luar negeri yang diterapkan oleh Indonesia dengan tidak terpengaruh maupun tergabung dalam blok manapun dengan adanya alasan politik, namun tetap aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Dalam kenyataannya, Indonesia melakukan hubungan kerja sama diplomatik, kerja sama bilateral, maupun kerja sama multilateral (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014). Hal ini merupakan usaha diplomasi Indonesia demi mewujudkan kepentingan nasionalnya berdasarkan pada politik luar negeri bebas aktif. Demi untuk terciptanya perdamaian dunia, selain untuk mewujudkan

kepentingan nasionalnya usaha yang dilakukan Indonesia adalah memperjuangkan diplomasi politik Indonesia untuk Palestina.

Pijakan politik luar negeri Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai pedoman bagi kehidupan berbangsa serta bernegara meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Adapun, dasar konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, terutama dalam alinea pertama dan keempat. Alinea pertama menyatakan:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Alinea keempat menyatakan:

“...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Negara Indonesia sendiri memiliki prinsip bahwasanya segala bentuk penjajahan apa pun tidak sejalan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan yang ada di muka bumi ini, salah satunya adalah yang tengah dilakukan negara Israel terhadap Palestina. Selain itu, Indonesia sebagai negara dunia ketiga yang memiliki penduduk sebagian besar adalah muslim mempunyai kesamaan dalam hal pandangan maupun kesamaan dalam hal agama, yaitu Islam dan juga memiliki kesamaan dalam persepsi untuk menjaga daerah yang telah dianggap suci bagi sebagian besar penduduk muslim adalah Masjidil Aqsa di Jerusalem (Satrio, 2019a). Hubungan yang terjalin antar negara baik itu Indonesia dan Palestina turut mendorong pemerintah Indonesia melakukan berbagai langkah inisiatif untuk berperan serta turut membantu dalam penanganan korban yang disebabkan oleh agresi Israel dan perjuangan kemerdekaan negara Palestina.

Menurut historis, hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Palestina sudah sangat lama, hal tersebut bermula sejak masa peralihan Indonesia menuju kemerdekaan sampai pengakuan kemerdekaan Indonesia. Negara Palestina merupakan negara yang pertama pada wilayah Timur Tengah yang turut membantu menyebarluaskan kemerdekaan Indonesia. Berkat hal inilah kemerdekaan yang

diraih Indonesia dapat terdengar kepada masyarakat dunia. Selain itu, pada tahun 1948 Mufti Haj Amin El Husni datang ke Indonesia sebagai perwakilan rakyat Palestina untuk menyampaikan bahwa adanya dukungan dari masyarakat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam kunjungan ini merupakan sebagai bentuk dukungan serta simpati sasi rakyat Palestina karena Palestina juga mengalami hal yang sama dengan Indonesia pada saat itu (Gama, 2023).

Disisi lain, Indonesia sendiri menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara di Timur Tengah kecuali negara Israel yang kita kenal dengan negara zionis penjajah bangsa Palestina. Indonesia dengan negara Israel adalah dua negara yang meraih kemerdekaanya dalam waktu yang berdekatan. Kedua negara ini merupakan negara yang menganut konsep pro-demokrasi dalam wilayahnya masing-masing. Akan tetapi, dengan kemerdekaanya yang saling berdekatan ini, kedua negara tersebut masih belum bisa memiliki hubungan diplomatik terutama Indonesia yang pada dasarnya mendukung kedaulatan negara Palestina.

Dalam lingkup internal Indonesia, masalah hubungan antara Indonesia dan Israel adalah isu yang sangat sensitif. Salah satu permasalahan utama di Indonesia adalah adanya pandangan negatif yang mendominasi pandangan mayoritas masyarakat terhadap peran Israel dalam konteks politik Timur Tengah hingga tingkat global. Citra buruk yang melekat pada Israel di kalangan masyarakat Indonesia telah mengakibatkan adanya penentangan keras terhadap negara tersebut. Sikap psikologi kolektif ini telah menjadikan Israel sebagai musuh bersama bangsa Indonesia. Disisi lain, Indonesia mungkin melihat potensi manfaat dalam menjalin hubungan dengan Israel, sebuah negara yang memiliki pengaruh besar dalam diplomasi Internasional. Keberadaan Israel sebagai pelaku diplomasi aktif di dunia dapat memberikan akses maupun peluang bagi Indonesia untuk memajukan agenda strategis di forum internasional (Suhartiningtyas, 2018). Selain itu, Israel sendiri dikenal sebagai negara dengan tingkat teknologi tinggi, Indonesia dapat mempertimbangkan kolaborasi dalam bidang teknologi guna meningkatkan produksi domestik. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwasanya sikap politik Indonesia cenderung menentang pembentukan hubungan apapun dengan Israel, terutama mengingat tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa

Palestina. Ini adalah faktor kunci yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia dalam menolak untuk menjalin hubungan dengan Israel dalam bentuk apapun itu.

Di tengah situasi yang sulit ini, Indonesia justru tetap berusaha meningkatkan diplomasinya yang ditandai dengan partisipasi aktif mendeklarasikan dukungannya dalam berbagai forum internasional sekaligus mengajak negara-negara lain untuk mendukung Palestina. Terlebih Indonesia sendiri memiliki posisi yang cukup strategis karena pada dasarnya Indonesia memiliki pengalaman yang sama seperti Palestina dengan memperjuangkan kemerdekaan negara agar diakui oleh rakyat internasional. Dukungan yang dilakukan Indonesia dalam forum ataupun organisasi berdirinya digagas oleh Indonesia dan dengan adanya sebuah komitmen yang dimiliki Indonesia dalam mendukung Palestina.

Indonesia telah menunjukkan dukungannya terhadap Palestina melalui penyelenggaraan berbagai konferensi serta peranya di berbagai forum internasional (Wulansari, 2015). Pada tahun 2015, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika yang menghasilkan deklarasi khusus untuk mendukung Palestina. Pada tahun 2016, Indonesia juga menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang membahas mengenai isu-isu Palestina dan Al-Quds Ash-Sharif. Hal tersebut menunjukkan komitmen berkelanjutan Indonesia penyelesaian konflik Israel-Palestina. Pada ranah PBB, Indonesia sendiri telah memainkan peran aktif dalam memprioritaskan isu Israel-Palestina. Sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Indonesia mempromosikan diselenggarakannya sidang khusus Dewan HAM pada tahun 2009 untuk membahas isu Palestina. Indonesia juga menjadi *co-sponsor* dalam upacara bersejarah di PBB pada tahun 2015, yaitu pada saat pengibaran bendera Palestina pada markas besar PBB di New York pada tanggal 30 September 2015. Dengan adanya langkah-langkah ini, Indonesia telah menunjukkan dukungan kuatnya terhadap upaya Palestina untuk mencapai kedaulatannya (Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, 2014).

Meskipun telah banyak perundingan serta kesepakatan yang terjadi, tidak ada kesepakatan yang benar-benar bertujuan mencapai kedaulatan Palestina secara

penuh. Faktanya, Israel masih memiliki kendali penuh atas wilayah Palestina, termasuk pendirian pemukiman Yahudi ilegal di wilayah Palestina serta adanya operasi militer yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari warga sipil Palestina (Prasetya & Srifauzi, 2018). Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya hukum internasional dalam memberikan sanksi yang efektif terhadap negara-negara yang melanggar ketentuan hukum internasional. Menghadapi berbagai tindakan yang dianggap melanggar hak-hak Palestina, Palestina sendiri berupaya mendapatkan pengakuan internasional atas kedaulatannya. Pada tahun 2011, dibawah kepemimpinan Mahmoud Abbas, Palestina mengirimkan proposal sebagai anggota penuh PBB. Namun, upaya tersebut mengalami kegagalan ketika Dewan keamanan PBB tidak memberikan rekomendasi pada tahun yang sama.

Dalam melihat konflik Israel-Palestina diatas, maka peneliti ingin menganalisis adanya upaya politik luar negeri Indonesia dalam melihat konflik Israel-Palestina yang tiada habisnya serta melihat kedaulatan negara Palestina yang terancam akibat adanya serangan Israel. Oleh sebab itu, peneliti mempunyai ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Isu Kedaulatan Negara Pada Konflik Israel-Palestina”** yang memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia bisa membantu dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina dan bagaimana kedaulatan negara Palestina bisa ditegakkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini Bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam membantu penyelesaian isu kedaulatan negara konflik Israel-Palestina dari tahun 2013-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia bisa membantu dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran serta kontribusi Indonesia dalam resolusi konflik Israel-Palestina.

1.4 Manfaat Penelitian

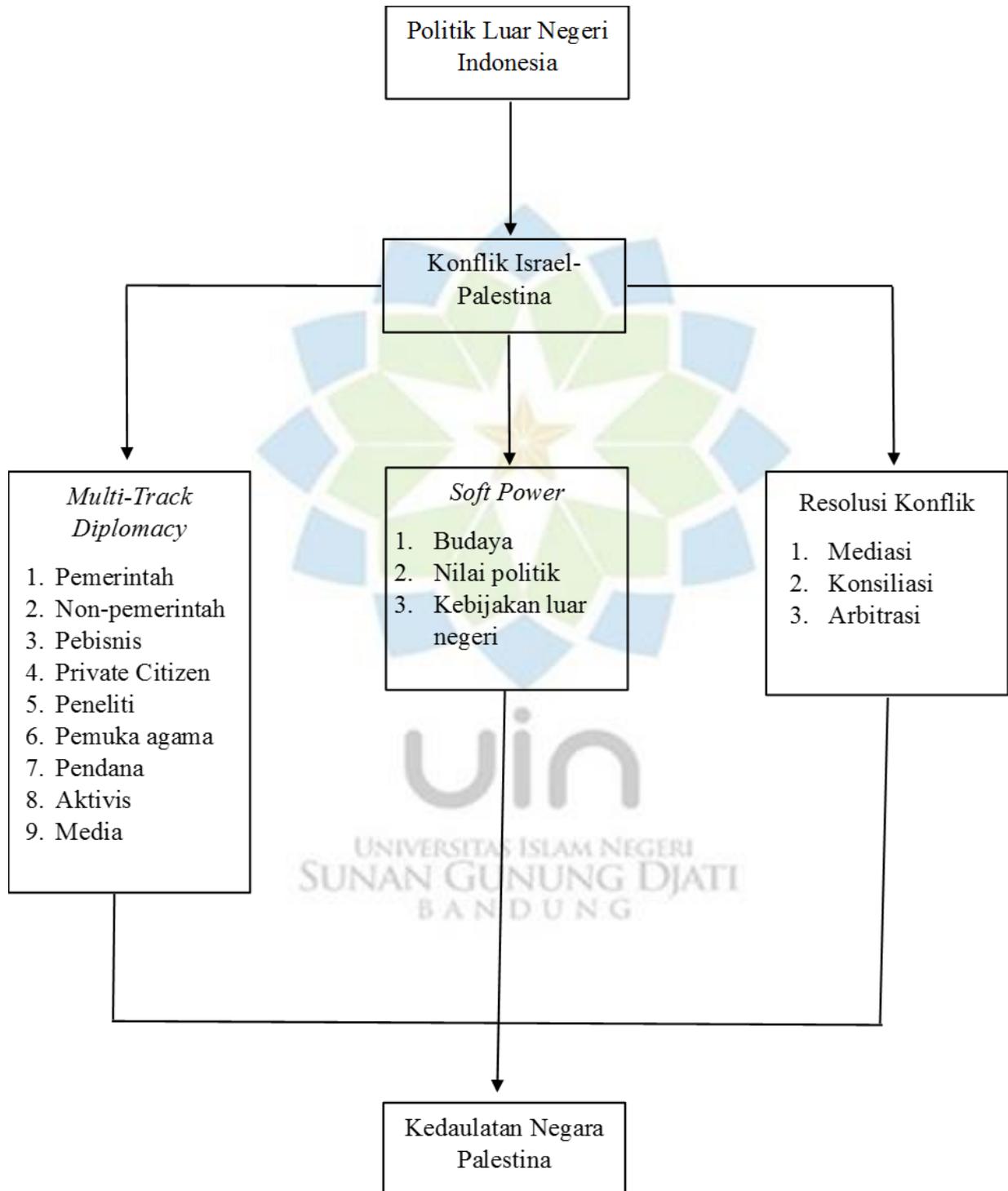
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara akademis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pada bidang politik.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi serta bahan pelengkap yang berharga bagi para peneliti selanjutnya untuk mendalami topik permasalahan terkait isu kedaulatan dalam melihat konflik antar negara dan resolusi konfliknya.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pembaca
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi serta acuan bagi para mahasiswa yang tertarik untuk membahas politik internasional.
 - b. Bagi penelitian
Sebagai proses pelaksanaan fungsi penelitian sebagaimana yang telah tertuang dalam prinsip dasar tri dharma perguruan tinggi.

1.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan awal mengenai fenomena-fenomena yang berlangsung pada objek permasalahan dalam penelitian. Berlandaskan dengan kerangka pemikiran, dapat dipahami tentang bagaimana Politik luar negeri Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik Israel-Palestina serta tidak diakui kedaulatan Palestina oleh negara-negara lain. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

Bagan 1. 1 Kerangka Berpikir



Tabel diatas menunjukkan bahwa kerangka berpikir dari penelitian ini mencoba menggabungkan konsep yang diangkat dalam fokus penelitian dengan teori terkait. Konsep pada penelitian meliputi dari kebijakan politik luar negeri indonesia dalam membantu menyelesaikan isu kedaulatan negara pada konflik Israel-Palestina. Konsep tersebut dilandasi oleh teori terkait, yaitu teori *Multi-Track Diplomacy*, teori *Soft Power*, serta teori Resolusi konflik.

Dengan menggunakan *Multi-Track Diplomacy*, peneliti dapat melihat isu kedaulatan negara dalam konflik Israel-Palestina dari berbagai sudut pandang yang lebih luas dan melibatkan banyak aktor serta elemen diplomasi. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam analisis peran Indonesia dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian, teori *Soft Power* membantu dalam memahami daya tarik diplomasi Indonesia dalam isu konflik Israel-Palestina. Hal ini melibatkan banyak aspek, seperti budaya, nilai politik, serta kebijakan luar negeri suatu negara yang digunakan untuk mempengaruhi serta membangun hubungan baik dengan pihak-pihak terkait dalam konflik tersebut. Penggunaan teori resolusi konflik dalam penelitian ini memberikan kerangka teoritis yang dapat membantu menganalisis konflik Israel-Palestina dengan fokus pada aspek kedaulatan negara Palestina. Hal ini membantu dalam memahami dinamika konflik serta peran Indonesia dalam upaya mencapai resolusi yang berkelanjutan

1.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pemahaman secara menyeluruh terhadap beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat dirangkum sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rezki Satris (Satris, 2019a) dengan judul *Peranan Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel*, penelitian ini membahas tentang peran politik luar negeri Indonesia terhadap Palestina pasca Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Penelitian ini difokuskan dalam mendeskripsikan dinamika kebijakan luar negeri Indonesia sebagai respons terhadap strategi Amerika Serikat terhadap Palestina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Indonesia melalui kebijakan luar

negerinya melakukan beberapa pendekatan kepada negara-negara di dunia sebagai respons terhadap kebijakan Trump. Setelah pengakuan Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel oleh Donald Trump selaku Presiden Amerika Serikat, hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai mediator dalam menciptakan perdamaian di Timur tengah terutama dalam konflik Israel-Palestina.

Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada perbedaan teori yang dipakai dan penelitian Rezki Sartis ini lebih fokus pada peran politik luar negeri Indonesia setelah adanya pengakuan ibu kota Jerusalem di Palestina tanpa dilihat dari sisi kedaulatan negara Palestina. Pendekatan yang digunakan Rezki pada penelitiannya kurang lebih sama dengan penulis gunakan yakni pendekatan kualitatif dan memakai teori yang sama yaitu resolusi konflik.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muh. Novan Prasetya dan Aulia Srifauzi (Prasetya & Srifauzi, 2018) dengan judul *Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina*, penelitian ini membahas tentang diplomasi politik Indonesia dalam kemerdekaan Palestina. Penelitian ini difokuskan dalam empat bagian pembahasan, yaitu uraian mengenai bantuan negara Indonesia kepada Palestina, menjelaskan mengenai perjuangan Palestina, serta menjabarkan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ditinjau dari hal politik maupun keterlibatan masyarakat Indonesia dalam menyuarakan kemerdekaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia berusaha keras untuk mendukung penyelesaian masalah ini dengan menyelenggarakan KTT luar biasa OKI. Berbagai usaha dilakukan seperti, menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, melakukan pendekatan ke berbagai negara termasuk Israel dalam usahanya menyelesaikan konflik, serta melibatkan masyarakat Indonesia sendiri dalam memberikan bantuan dukungan untuk Palestina. Semua hal yang dilakukan Indonesia tersebut semata-mata untuk memperjuangkan hak-hak negara Palestina.

Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada perbedaan teori yang dipakai dan lebih fokus pada diplomasi politik luar negeri Indonesia tanpa adanya isu kedaulatan negara Palestina serta resolusi konfliknya. pendekatan yang digunakan Muh. Novan Prasetya dan Aulia Srifauzi

pada penelitiannya kurang lebih sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas peran diplomasi Indonesia terhadap Palestina.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Adettia Gama (Gama, 2023) dengan judul *Sikap Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Perpindahan Ibu Kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem di PBB (2014-2019)*, penelitian ini membahas tentang sikap dari Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik perpindahan ibu kota Israel ke Yerusalem pada rapat PBB. Penelitian ini difokuskan dalam hal mengetahui serta mendeskripsikan peran yang dilakukan oleh Indonesia dalam menyelesaikan konflik Perpindahan ibu kota Israel pada rapat PBB dari periode 2014 sampai dengan 2019. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya masih tetap konsisten untuk mendukung keberadaan Palestina melalui pendekatan *soft power* ataupun diplomasi tanpa adanya sebuah tindakan militer atau *hard power* dalam mewujudkan kebijakan luar negeri Indonesia.

Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada perbedaan teori yang dipakai dan lebih membahas mengenai perpindahan ibu kota Israel dalam rapat PBB dari periode 2014-2019. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian Adettia Gama kurang lebih sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas *Soft Power* diplomasi Indonesia dalam konflik Israel-Palestina.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Relycia Solihin, Herlina Juni Risma Saragih, Bayu Setiawan & Pujo Wido (Solihin et al., 2023) dengan judul *Peran Indonesia Pada Konflik Israel – Palestina Melalui Multi-Track Diplomacy*, penelitian ini membahas tentang peran Indonesia dalam konflik-Israel dalam pandangan *Multi-Track Diplomacy*. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis peran dari Indonesia dalam resolusi konflik melalui jalan *Multi-Track Diplomacy*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia berperan pada konflik Israel-Palestina dengan keterlibatannya berbagai elemen di ranah internasional dapat berjalan dengan efisien dengan melalui sembilan jalan diplomasi, yaitu melalui aktivis, pemuka agama, pebisnis, pemerintah, pendamai non-pemerintah, pendana, hingga media.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada terletak dari perbedaan teori dan tidak membahas kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk mencapai kedaulatan negara Palestina. Pendekatan yang digunakan peneliti Solihin dan yang lainnya kurang lebih sama menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teori yang sama mengenai *Multi-Track Diplomacy*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ulya Fuhaidah (Fuhaidah, 2012) dengan judul *Analisis Peluang Kedaulatan Negara Palestina*, penelitian ini membahas mengenai adanya peluang kedaulatan negara Palestina. Penelitian ini difokuskan untuk mengungkap konflik Israel-Palestina dan bagaimana masa depan Palestina. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdirinya Negara Palestina yang berdaulat hanyalah khayal kecuali adanya tiga faktor berikut ini, yaitu dengan bersatunya faksi politik; Hamas dan Fatah dalam mewujudkan kemerdekaannya, adanya pengakuan dari negara Israel bahwa negara Palestina memiliki hak kedaulatan negara sehingga mereka dapat hidup secara berdampingan, dan yang terakhir dengan “Untuk mengirim pulang komunitas Yahudi ke Eropa” seperti pernyataan dari Mahmoud Ahmed Nejad.

Perbedaan mendasar penelitian yang dilakukan Ulya Fuhaidah dengan penulis terletak dari perbedaan teori dan penelitian ini tidak membahas kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam konflik tersebut. Pendekatan yang dilakukan peneliti Ulya Fuhaidah dengan penulis kurang lebih sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas isu kedaulatan negara dalam konflik Israel-Palestina.